



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 230 TAHUN 1961  
TENTANG  
MERUBAH JANGKA WAKTU YANG TERSEBUT DALAM PASAL 5 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1961

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca kembali : Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1961;

Menimbang : bahwa jangka waktu 3 bulan yang tersebut dalam pasal 5 Peraturan  
Pemerintah Nomor 12 tahun 1961 perlu dirubah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MERUBAH JANGKA  
WAKTU YANG TERSEBUT DALAM PASAL 5 PERATURAN  
PEMERINTAH No. 12 TAHUN 1961.

Pasal 1.

Jangka waktu 3 bulan yang tersebut dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah  
Nomor 12 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 Nomor 33)  
dirubah menjadi 1 tahun.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai hari diundangkan dan berlaku  
surut sampai tanggal 24 Maret 1961.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 1961.  
Presiden Republik Indonesia

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 1961,  
Sekretaris Negara,

MOHD. ICHSAN

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 289;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 230 TAHUN 1961  
TENTANG  
MEROBAH JANGKA WAKTU YANG TERSEBUT DALAM PASAL 5 PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 1961.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1961 menetapkan jangka waktu 3 bulan sebagai masa bekerjanya Panitia Kerjasama Menteri - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat. Sesudah memperhatikan rapat-rapat yang diadakan oleh Panitia-panitia tersebut, ternyata jangka waktu 3 bulan itu tidak mencukupi, antara lain disebabkan para anggota Panitia Kerjasama- itu mempunyai jabatan-jabatan lain di samping menjadi anggota Panitia Kerjasama tersebut, sehingga mereka tidak dapat memberikan seluruh waktunya kepada pekerjaan-pekerjaan dalam Panitia Kerjasama itu. Berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, waktu yang disebut dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1961 tersebut dirobah menjadi 1 tahun.

Jakarta" dengan Peraturan Pemerintah Nomor 205 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 244) PPD, maka hingga sekarang Perusahaan Negara tersebut dikuasai, diasuh dan dibimbing oleh Pemerintah Pusat c.q. Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

Keadaan demikian tidak layak dipertahankan lebih lama lagi, maka dari itu setelah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya menyatakan kesediaannya untuk menyelenggarakan sendiri perusahaan pengangkutan penumpang untuk umum dengan kendaraan bermotor dalam wilayahnya, PPD perlu segera diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Tidak memerlukan penjelasan.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2332

-----

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG